

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orde Baru merupakan sebuah tatanan seluruh kehidupan rakyat dan negara yang mana diposisikan kepada keautentikan dalam pelaksanaan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru Hadir untuk menjawab atas reaksi dan kritik principal terhadap implementasi yang disalahgunakan pada masa lalu, yang dikenal dengan masa Orde Lama. Penjelasan tentang Orde Baru yang utama yakni suatu Orde yang memiliki sikap dan tekad mental yang mendalam untuk mengabdikan kepada rakyat dan bangsa yang dilandasi dengan Pancasila dan menjunjung tinggi azas Undang-Undang Dasar 1945.¹

Berbicara Orde Baru tidak akan pernah ada ujungnya. Kekuatan politik yang dimilikinya tersimpan kedigjayaannya, meskipun banyak kritik, sejak adanya pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru hadir sejak tahun 1966-1998, dengan terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) yang mana terjadi salah penafsiran sebagai peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jendral Soeharto. Tepatnya pada tanggal 27 Maret 1968, Jendral Soeharto resmi diangkat menjadi presiden karena berdasarkan keputusan dari ketetapan MPRS No.XLIV/MPRS 1968, sampai ditetapkannya hasil pemilu ditanggal 10 Maret 1983 dan Presiden mendapatkan gelar sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Dengan presiden Soeharto memegang kekuasaan sebagai hasil

¹ Pidato Pejabat Presiden/Ketua Presidium Kabinet Ampera pada Sidang Paripurna Kabinet Ampera mengenai Pokok-pokok Kebijakan Kabinet Ampera Selanjutnya Setelah Sidang Istimewa MPRS/1967 dan Rencana Pembangunan Selanjutnya, tanggal 19 April 1967

ketetapan MPRS dan MPR sejak tahun 1973. Kekuasaan eksekutif yang pada waktu itu memiliki dominasi kekuatan dalam pemerintahan Indonesia yang mana telah tertulis dalam UUD 1945 pasal 5, yang berbunyi bahwa Presiden berhak atas pembentukan Undang-Undang atas pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat, dari hal tersebut terlihat bahwasannya Presiden memiliki hak ganda yakni dapat berperan sebagai Eksekutif dan Legislatif dalam roda pemerintahan.²

Kiprah gemilang Orde Baru Ketika terjadinya peristiwa Malaria ditahun 1974 dominasi oleh kelompok Militer dan jaringan Politik lainnya. Metode dalam menciptakan kestabilan politik rezim Orde Baru tidak hanya pada ranah perpolitikan dengan kekuatan yang mayoritas partai-partai yang masuk kedalam tubuh pemerintahan seperti dengan munculnya Golkar (Golongan Karya), PDI (Partai Demokrasi Indonesia), dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Namun, upaya dalam penyelarasan asas dengan menggunakan Pancasila menjadi sortiran langkah selanjutnya bagi Soeharto dan para jajaran didalam pemerintahan Orde Baru. Maka ide yang direncanakan agar selaras validitas partai politik dan beberapa organisasi sosial-keagamaan dilakukan. Ide penyelarasan pada awalnya hanya tertuju pada partai Politik, kemudian berkembang pada organisasi sosial-budaya dan keagamaan yang lainnya, bahkan pada ranah pelajar dan Mahasiswa.³

Menurut Yohanes S Widada dkk dalam buku yang ditulisnya tentang *Revolusi Politik Kaum Muda*, menjelaskan bahwa kondisi dan keadaan Orde Baru yang melakukan Kegiatan Konsolidasi Politik untuk

² Djiwandono dkk, *Revitalisasi Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: CSIS, 1996), Hlm.34.

³ Sivfian Hendra Legowo dkk, *Dinamika Politik Rezim Orde Baru di Indonesia Studi Tentang Kegagalan Konsolidasi Politik Rezim Orde Baru Pada Tahun 1990-1996*, Publika Budaya, Volume 1 (1) November 2013, Hlm.17.

menciptakan kestabilan politik dan keamanan negara. Proses politik Orde Baru bukan hanya tentang kekuasaan yang mendominasi pada militer tetapi direalisasikan dengan berbagai rencana konsolidasi politik yang mencakup tentang 1) Konsolidasi Ideologi, 2) Konsolidasi sistem kepartaian, 3) Depolitisasi massa, 4) konsolidasi teknokrat, 5) Konsolidasi birokrasi, 6) Konsolidasi Ormas, LSM, dan Gerakan mahasiswa, dan 7) Konsolidasi Pers.

Berjalannya kekuasaan pemerintahan Orde Baru tidak dapat lepas dari faktor hegemoni yang melekat dan terlembagakan dalam tubuh pemerintahan. Sebenarnya masa depan suskses Indonesia terhadap pemerintahan Orde Baru telah terlembagakan bahkan banyak dukungan dan sebaliknya dalam menanggapi pertanyaan tersebut. Didalam tubuh pemerintahan sendiri terdapat Aktor kedua dalam mendominasi Orde Baru yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Namun, nyatanya terjadi perselisihan dalam tubuh ABRI tetapi bukan karena Internalnya sendiri melainkan pusat dari perselisihan itu ada pada Soeharto sebagai presiden, pemegang kekuasaan tertinggi sipil dan dalam Militer. Semua kelompok dan Individu mencari pusat perhatian kepada Soeharto dengan tujuan untuk menjadi pemenang bagi rivalitas mereka, yang akhirnya terjadilah perpecahan. Dibalik konflik yang terjadi, Orde Baru memiliki keberhasilan dalam menguasai aturan politik nasional dan pada aspek Pers yang telah berjalan dalam mengikuti dinamika keadaan politik yang menarik.⁴

Kelas-kelas baru yang muncul pada masa Orde Baru terlahir dari Industrialisasi yang cepat. Pemerintahan melakukan pembangunan yang luar biasa sehingga melupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak politik

⁴ Ibid, Hlm.20.

yang dimiliki rakyat yang menyebabkan terjadinya pemerintahan Otoriter, Permasalahan Sosial yang menjadi gugatan pada pemerintahan Orde Baru korupsi dan penyelundupan. Perkembangan ini terus di kontrol oleh Mahasiswa. Gerakan mahasiswa yang mengkritisi dari segi strategi pembangunan dan kepemimpinan pada tahun 1977-1978 yang dapat mengakibatkan kali pertamanya beberapa perguruan tinggi ditundukkan oleh militer. Hal tersebut diiringi dengan dihilangkannya Dewan Mahasiswa dan diimplementasikannya kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang mana didalamnya terdapat kebijakan yang mengubah susunan organisasi mahasiswa dengan tidak mengizinkan mahasiswa turun lapangan kedalam politik praktis, yaitu dengan SK Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 0457/0/1990 tentang pola pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di dalam Perguruan Tinggi, dimana organisasi kemahasiswaan pada tingkat Perguruan Tinggi bernama SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi). NKK/BKK menjadi dua abreviasi yang menjadi puaka bagi aktivis Gerakan mahasiswa pada saat itu.

Setelah diterapkannya NKK/BKK, garis perjuangan yang ditempuh oleh Mahasiswa dengan menggunakan sarana lain untuk menghalau sikap represif pemerintahan yaitu dengan berbaaur dan aktif di Organisasi kemahasiswaan ekstra kampus seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), PMKRI (Pergerakakn Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) atau yang dikenal dengan Organisasi Mahasiswa Cipayung, didalamnya juga diciptakan ruang-ruang diskusi dan pers Mahasiswa. Gerakan yang diwujudkan untuk menyuarakan hak berpendapat dalam dalam wujud kebebasan Akademik dan kebebasan

mimbar Akademik didalam kampus di tahun 1987-1990 hingga akhirnya terjadi demonstrasi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa di dalam kampus. Pada waktu itu, demonstrasi dilakukan diluar kampus dengan berjalan kaki kearah Gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa namun tetap tidak diizinkan. Gerakan kolektif yang diciptakan oleh Mahasiswa tahun 1998 merupakan suatu upaya dalam menuntut reformasi dan dihilangkannya “KKN” (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) pada tahun 1997-1998, yang akhirnya menuntut presiden Soeharto untuk menanggalkan kedudukannya sebagai presiden. Berbagai Tindakan Represif dan arogan yang dilakukan oleh Aparat Keamanan sehingga adanya mahasiswa yang gugur dalam aksi demonstrasi tersebut. Gerakan Mahasiswa ditahun 1998 merupakan tampuk dari Gerakan Mahasiswa yang ditandai dengan runtuhnya pemerintahan Orde Baru dengan ditandai turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepemimpinannya tepat pada tanggal 21 Mei 1998.⁵

Dalam Gerakan Mahasiswa yang ada terdapat Organisasi Mahasiswa Nahdlatul Ulama yang turut aktif mengawal dan mengawasi pemerintahan Orde Baru yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) karena tidak dapat lepas dari aktivitas mahasiswa. Dari aksi yang dilakukan, pemerintahan beranggapan bahwa aksi Mahasiswa itu dinilai menjurus pada pengorongan wibawa pemerintahan dan mengganggu keseimbangan nasional.⁶ Pada masa Orde Baru sendiri seluruh Organisasi politik, diharuskan berazaskan satu yakni Pancasila, konsekuensinya, tidak ada lagi partai politik yang berazaskan agama atau faham lainnya kecuali

⁵ Edward Aria Jalu Taufan Putera, Skripsi: “*Pengekangan Grakan Mahasiswa: Tinjauan Terbitnya Kebijakan Normalisasi Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan di Era Orde Baru*”, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2018), Hlm.1-2.

⁶ Fauzan Alatas, *PMII Dalam Simpul-simpul Sejarah Perjuangan*, (Jakarta: Intimedia, 2015), Hllm.163.

Pancasila. Namun, presiden soeharto menjelaskan bahwasannya memberikan jaminan tentang pemberlakuan azas tunggal Pancasila tidak akan menghilangkan motivasi dasar dari suatu organisasi. Bahkan pemerintahan memastikan kemajuan dan kesemarakan dari masing-masing Organisasi itu akan tetap. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pandangan sikap yang diambil oleh PMII terhadap diterapkannya Pancasila sebagai satu-satunya Azas. Pada saat memperingati hari lahirnya Pancasila, ketua Umum PB PMII Surya Darma Ali menyampaikan pidatonya dan menyinggung tentang sikap PMII terhadap kebijakan pemerintahan tersebut. Bagi PMII sendiri kesepakatan dasar yang telah dikenal dengan Pancasila itu dapat diterima dan disetujui. Dinamika yang terjadi saat masa Orde Baru pada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sendiri memiliki dampak bagi setiap gerakannya.

Di wilayah Cirebon sendiri organisasi Gerakan mahasiswa salah satunya PMII memiliki andil dalam perkembangan yang terjadi pada saat Orde Baru karena kebijakan Orde Baru terdapat dampak bagi Organisasi yang ada di setiap daerahnya yang dapat mengubah kultur organisasi yang ada salah satunya di Cirebon, maka Penelitian ini akan membahas tentang sejarah dan perkembangan organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di wilayah Cabang Cirebon pada masa Orde Baru.

Berdasarkan hasil uraian diatas dari sebuah analisis dan studi kasus dilapangan perihal organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dimasa Orde Baru. Hal ini membuat penulis tertarik untuk membahas **“SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) PADA MASA ORDE BARU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Cirebon?
2. Bagaimana perkembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Cabang Cirebon pada masa Orde Baru?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan Masalah diatas tujuan dan manfaat dari penulisan Proposal penelitian ini disusun untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang sejarah berdirinya Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Cirebon.
2. Menjelaskan tentang perkembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Cabang Cirebon pada masa Orde Baru.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap tulisan ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan manfaat bagi kalangan intelektual dan berbagai:

1. Bertambahnya Informasi dan kkhazanah keilmuan sehingga memiliki keluasaan berfikir dan sebagai bahan tambahan referensi oleh pihak yang berkepentingan dalam melakukan penelitian yang sudah ada atau dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian sebelumnya.
2. Untuk memperbanyak kajian perihal Sejarah di Indonesia khususnya perihal tentang Sejarah berdirinya Gerakan organisasi

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Cirebon dan perkembangannya pada saat Orde Baru.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan informasi untuk melengkapi sejarah dan dinamika Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Cirebon.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Historis, yang memiliki arah untuk memberikan pandangan dalam pemaparan atas suatu deskripsi permasalahan yang terjadi pada masa lalu. Historis adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang didalamnya mengkaji tentang suatu peristiwa dengan memfokuskan terhadap beberapa unsur seperti unsur waktu, objek, latar belakang dan pelaku dari kejadian tersebut. Menurut Ilmu Sejarah atau Historis, segala peristiwa atau kejadian dapat diidentifikasi dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, kausalitasnya, dimana dan siapa saja yang berkontribusi dalam peristiwa tersebut.⁷

Dalam penulisan ini, akan membahas tentang sejarah dan perkembangan Gerakan Mahasiswa yang dinamakan dengan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Cirebon pada masa Orde Baru, sedangkan selain organisasi Selain PMII Cabang Cirebon tidak saya tulis. Dalam penelitian ini pula penulis memberikan Batasan dari tahun 1966-1998. Akan tetapi, pembahasan tersebut meliputi dinamika yang terjadi di wilayah Pergerakan Mahasiswa Islam Indoneisa (PMII) pada saat Pra Orde baru yang mana terjadi transisi dari wilayah pemerintahan yang pada akhirnya memiliki pengaruh dalam Gerakan

⁷ Atang Abdul Hakim, *Metodelogi Studi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), Hlm.65.

mahasiswa serta masa saat Orde Baru mulai menanamkan pengaruhnya dan pada masa Paska Orde Baru. Dari setiap dinamika yang terjadi, terdapat perkembangan yang ada pada organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Cirebon di masa Orde baru dalam segi gerakan sosial dan Politik. Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, maka diperlukan pendekatan-pendekatan Ilmu Sosial lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Sartono Kartodirjo bahwa pandangan kita perihal suatu peristiwa atau kejadian sangat tergantung pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian, dimensi mana yang diperhatikan dan unsur mana saja yang dapat dijelaskan.⁸

Dengan menggunakan pendekatan Historis, penulis berusaha untuk dapat menjelaskan dan mendeskripsikan sejarah dan perkembangan organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Cirebon pada masa Orde Baru.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu cara atau proses untuk mengidentifikasi tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan berpikir dan landasan berpijak dalam melakukan suatu penelitian. Kerangka teori juga dapat dijelaskan dan terkonsep secara terstruktur berdasarkan dari Tinjauan Pusaka yang dapat digunakan dalam penelitian sebagai rangka yang akan dijadikannya sebagai pijakan dalam penyelesaian masalah serta dapat digunakan untuk Menyusun hipotesis (Dugaan sementara).⁹ Menurut para ahli, dalam melakukan penelitian dan mengkaji terhadap suatu peristiwa masa lampau, maka diperlukannya teori dan konsep yang mana keduanya

⁸ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), Hlm 4.

⁹ Gunardi, *Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian*, Era Hukum No.1 TH.13 September, 2015.

memiliki fungsi sebagai pisau analisis serta sintesis sejarah. Kerangka teori maupun konseptual berarti terdapat metodologi didalamnya yakni suatu kajian sejarah yang akan diteliti dan pokok dari metodologi sejarah yakni pendekatan yang dipakai selama proses penelitian.¹⁰

a. Gerakan Sosial (*Social Movement*)

1. Pengertian

Menurut Macdonald Gerakan sosial (*Social Movement*) adalah suatu versi paling utama dari Gerakan kolektif. Gerakan kolektif diartikan sebagai suatu Tindakan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan status, kekuasaan, atau pengaruh dari suatu kelompok. Mengacu pada konsep Olson, maka inti dari Gerakan kolektif yakni adanya suatu kepentingan umum atau Bersama (*Public goods*) yang dibawa antar kelompok. Menurut Weber sendiri, suatu perilaku yang dapat dikatakan terjadi saat suatu individu memosisikan makna subjektif dalam Tindakan mereka. Keadaan tersebut tidak hadir dalam konteks Gerakan kolektif.

Locher menjelaskan bahwa perbedaan Gerakan sosial dari bentuk perilaku kolektif yang lainnya, yaitu: *Crowd* (Kerumunan), *riot* (Kerusuhan), dan *rebel* (penolakan, pembangkangan), dapat dilihat dari tiga aspek, yakni:

- a) Aspek Pengorganisasian (*Organized*) merupakan sesuatu kegiatan yang tersusun secara terstruktur, sedangkan sikap kolektif (*Collective Behavior*) biasanya muncul ataupun terjalin tidak terorganisir. Dalam sesuatu sikap kolektif, tidak

¹⁰ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), Hlm. 25.

terdapat tugas-tugas spesial yang wajib dicoba oleh partisipan, sedangkan dalam sesuatu gerakan sosial para partisipan kerap kali diberikan tugas-tugas utama agar dapat ditampilkan, dimana mereka pula secara hati-hati merancang sesuatu taktik serta strategi aksi. Dalam gerakan sosial, para pemimpin (*leaders*) kerap kali mempersiapkan serta merancang pekerjaan serta tugas-tugas utama untuk para partisipan gerakan.

- b) Aspek Pertimbangan (*Deliberate*) adalah Suatu gerakan sosial (*social movements*) pula terjalin sebab adanya suatu pertimbangan. Karena sebagian besar kejadian sikap kolektif (*collective behavior*) terjalin tanpa terdapatnya perencanaan apapun dari mereka menyangkut waktunya. Sedangkan gerakan sosial (*social movements*), secara intensif sengaja mencuat serta para partisipan secara hati-hati memutuskan apakah turut atau tidak turut ikut serta dalam sesuatu gerakan. Keterlibatan para partisipan seringkali didorong oleh janji-janji serta dorongan keanggotaan (*membership drives*), gerakan sosial (*social movement*) mencari publisitas serta berupaya untuk menarik sebanyak bisa jadi orang-orang agar dapat menunjang suatu gerakan. Pertimbangan perencanaan ini tidak terjalin pada sebagian besar wujud dari sikap kolektif (*collective behavior*).
- c) Daya Tahan (*Enduring*) adalah Aksi gerakan sosial biasanya berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama (*Long lasting*). Sementara perilaku kolektif (*Collective behavior*) terjadi dalam kurun waktu relatif singkat.¹¹

¹¹ Oman Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, (malang: Intrins Publishing, 2016), Hlm.11-13

Klandermans mengutip dari Pendapat Tarrow yang menjelaskan bahwa *Social Movement* yakni suatu Gerakan perlawanan kolektif oleh sekelompok orang yang memiliki solidaritas dan tujuan yang sama dalam sebuah proses atau cara korelasi yang dilakukan secara berlanjut dengan pihak elit, pihak lawan dengan pihak yang berkuasa. Dari penjelasan Tarrow tersebut maka dapat dielaborasi bahwa:

- a. suatu gerakan merupakan aksi penentangan terhadap elit, otoritas, dan terhadap ketentuan kelompok serta budaya mapan yang lain.
 - b. Suatu Gerakan yang dilaksanakan mengatasnamakan yang sama terhadap pihak lawan, pihak berwenang dan kalangan elit.
 - c. Suatu Gerakan yang dilandaskan atas rasa solidaritas dan identitas kolektif, dan
 - d. Untuk dapat melanjutkan estafek Gerakan dengan arah tujuan kolektif, maka dibuatlah konflik yang dipola kedalam suatu Gerakan sosial.¹²
2. Karakteristik Gerakan Sosial
- Adapun Karakteristik Gerakan sosial menurut Greene, yaitu:
- a. Dilakukan berkelompok
 - b. Memiliki tujuan universal untuk mengakomodasi atau mengantisipasi suatu perubahan sosial.
 - c. Terdapat struktural dengan adanya pemimpin yang diakui.

¹² Ibid, Hlm.14

- d. Adanya suatu kegiatan yang di Yakini dalam waktu yang cukup lama. Gerakan sosial biasanya lebih permanen dan tersusun secara terkonsep dan terorganisir dibandingkan dari tipe perilaku kolektif. ¹³

3. Tipelogi Gerakan Sosial

Blumer mengklasifikasikan Gerakan sosial kedalam dua tipe, yaitu: (1) Gerakan sosial umum (*General Social Movement*) dan (2) Gerakan Sosial Khusus (*Specific Social Movements*). Gerakan sosial umum (*General Social Movement*) adalah suatu Gerakan perubahan yang memiliki nilai dan makna di masyarakat sedangkan Gerakan Sosial Khusus (*Specific Social Movements*) adalah Gerakan yang terfokuskan lebih spesifik. Namun, berdasarkan dari dimensi target perubahan (*Who is Changed*) dan dimensi jumlah besarnya suatu perubahan, maka Gerakan sosial dapat dikelompokkan menjadi empat tipe, yaitu: Gerakan sosial Alternatif (*Aletrnative Social Movements*), Gerakan Sosial Pembebasan (*Redemptive Social Movements*), Gerakan Sosial Reformasi (*Reformative Social Movements*) dan Gerakan Sosial Revolusi (*Revolutionary Social Movements*). Dari pengkelompokan tipe Gerakan tersebut maka Macionis dan Locher membaginya berdasarkan kedua dimensi tersebut. Dan selanjutnya dari keempat tipe Gerakan sosial yaitu sebagai berikut:

- a. *Aletrnative Social Movements* (Gerakan sosial Alternatif) yaitu suatu Gerakan sosial yang berada pada tingkat resiko terhadap *status qou* relative kecil karena target dari Gerakan

¹³ Ibid, Hlm.15

sosial tersendiri adanya sebuah perubahan yang terbatas terhadap hanya beberapa dari populasi.

- b. *Redemptive Social Movement* (Gerakan Sosial Pembebasan) yaitu suatu tipe Gerakan sosial yang memiliki titik focus elektif, tetapi arahnya kepada perubahan yang lebih mengakar (Radikal) pada setiap individu.
- c. *Reformative Social Movement* (Gerakan Sosial Reformasi) merupakan suatu tipe Gerakan sosial yang memiliki tujuan untuk perubahan sosial yang terbatas pada setiap individu. Pada umumnya, terjadi pada wilayah politik. Gerakan ini bersifat progresif dan bersifat reaktif.
- d. *Revolutionary Social Movements* (Gerakan Sosial Revolusi) merupakan suatu Gerakan sosial yang paling ekstrem dibandingkan gerakan sosial yang lainnya karena berjuang untuk sebuah perubahan.¹⁴

Adapun menurut Zanden seorang sosiolog, mengemukakan pendapat dari segi basis tujuan ideologinya, dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

- (1) *Revolutionary Movements* (Gerakan Revolusi) yaitu Gerakan yang diarahkan untuk menukarkan nilai-nilai terdahulu dengan nilai-nilai yang baru.
- (2) *Reform Movements* (Gerakan Reformasi) yaitu suatu Gerakan yang diarahkan untuk melakukan sebuah perubahan supaya nilai-nilai yang sudah ada diimplementasikan sebagai penopang agar lebih kuat lagi.

¹⁴ Ibid, Hlm.27

- (3) *Resistance Movements* (Gerakan Perlawanan) yaitu suatu Gerakan yang dibangun untuk menolak suatu transformasi atau menghilangkan perubahan sebelum dilembagakan.
- (4) *Expressive Movements* (Gerakan Ekspresif) yaitu Gerakan perubahan yang sedikit di perhatikan dalam perubahan kelembagaan, akan tetapi lebih diperhatikan adanya suatu perubahan dari internal dengan metode untuk melakukan perubahan.

Adapun berdasarkan tujuannya, menurut Spencer dibagi menjadi tujuh kelompok, yaitu:

- (1) *Revolutionary Movement* (Gerakan Revolusi) merupakan gerakan yang berupaya untuk menggulingkan otoritas yang sudah kuat, apabila diperlukan bisa saja menggunakan kekerasan, misalnya gerakan bersenjata.
- (2) *Reform Movement* (Gerakan Reformasi) merupakan Gerakan yang ditujukan untuk memperbaiki permasalahan yang hadir, misalnya gerakan perempuan dan hak-hak sipil.
- (3) *Reactionary Movement* (Gerakan Reaksi) suatu gerakan yang mengharapkan kondisi kehidupan dikembalikan kepada tatanan masa lalu, berasumsi bahwa tatanan lama lebih baik daripada tatanan saat ini.
- (4) *Conservative Movement* (Gerakan Konservatif) suatu gerakan yang sederhana yang ditujukan untuk mempertahankan dan menjaga nilai-nilai tata cara kehidupan, misalnya gerakan kelompok konservatif untuk mempertahankan bangunan lama dan memperlambat laju pertumbuhan dan perubahan kota besar.

- (5) *Utopian Movement* (Gerakan Utopia) suatu gerakan yang bertujuan jangka panjang, menginginkan suatu hal baru dari suatu masyarakat yang berbeda dengan saat ini.
- (6) *Religious Movement* (Gerakan Religius) suatu gerakan yang mempunyai tujuan religius, misalnya gerakan mistik.
- (7) *Ethnic or nationalistic movement* (Gerakan Etnis/Nasionalis) suatu gerakan yang sangat penting dewasa ini dalam membuat suatu tranformasi sehingga memiliki pengaruh di seluruh dunia. Misalnya: The Chikano, Black, and American Indian Movements.¹⁵

Sejarah telah mencatatkan bahwa mahasiswa senantiasa selalu berdiri sebagai barisan garda terdepan dalam segala proses perubahan yang terjadi di Indonesia, bahkan karena peran dan sejarahnya tersebut mahasiswa dapat dianalogikan sebagai generasi yang patah tumbuh hilang dan berganti, tentunya tidak akan mudah dalam melupakan bagaimana peran suatu organisasi mahasiswa yang terjadi dan menjadi titik awal pergantian dalam strategi Gerakan organisasi Mahasiswa.¹⁶

G. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini mengambil titik pembahasan pada sejarah dan perkembangan Gerakan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada masa Orde Baru. Sejauh ini hasil penelitian dan penulisan yang dilakukan berkaitan dengan hal tersebut terdapat literatur dari sejumlah karya tentang organisasi tersebut ataupun melalui sejarah

¹⁵ Ibid, Hlm.29

¹⁶ Adi Suryadi Cull, *Patah Tumbuh Hilang Berganti: Sketsa Pergolakan Mahasiswa dalam Politik dan Sejarah Indonesia 1980-1998*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), Hlm.18

lisan, yang dijadikan *Literature Review* oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

- a. Buku PMII dalam Simpul-simpul Sejarah Perjuangan. Buku yang ditulis oleh Fauzan Alatas ini diterbitkan oleh Pengurus Besar (PB) PMII di Jakarta tahun 2006. Dalam buku tersebut menjelaskan tentang sejarah berdirinya PMII. Sejarah deskripsi buku ini menjelaskan dari awal embrio sampai proses perjalanan panjang yang menjadi sebuah langkah kecil organisasi mahasiswa Islam Nahdliyin hingga pembahasan sampai dengan kepada masa-masa bersejarah. Embrio Kelahiran (1955-1963), Masa kebangkitan (1964-1968), Masa Perjuangan Hidup Pergerakan (1970-1972), dan samapai pada masa Seperempat Abad Pergerakan (1981-1988).
- b. Fahmy Arya Saifuddin.Skripsi.2019. Program studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Penelitian ini berjudul *Sejarah Peran Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Surabaya Dalam Politik Nasional pada Tahun 1990-1998*. Skripsi ini menjelaskan tentang peran organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dikalangan Mahasiswa di Surabaya yang mana pada tahun tersebut terdapat peristiwa yang bergejolak politik dan terdapat masa transisi kekuatan Orde Baru ke Reformasi yang mana dari peristiwa tersebut memiliki dampak yang signifikan termasuk didalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) disurabaya. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada Peran Organisasi PMII Cabang Cirebon pada masa Orde Baru.

- c. Heni Khamdiah.Skripsi.2018. Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini berjudul *Sejarah Perkembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mojokerto Tahun 1999-2017*. Skripsi ini menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mojokerto yang mana mengalami dinamika selama proses perjalanannya, dan beberapa faktor pendukung dan penghambat didalam perjalanan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mojokerto di tahun 1999-2017. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tentang pada Sejarah PMII Cirebon yang akan dibahas dan dinamika yang terjadi pada masa Orde Baru.

Sedangkan dalam Skripsi yang saya tulis ini difokuskan kepada “Sejarah dan Perkembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Cirebon pada masa Orde Baru”. Mulai dari sejarah berdirinya dan perkembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada masa Orde Baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan sejarah sebagai pendekatannya, jika dilihat dari sisi fokus rumusan masalah serta tujuannya. Untuk itu, langkah-langkah penelitian ini akan terbagi ke dalam empat tahapan, yaitu, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Dalam sebuah penelitian sejarah yang akan dilakukan, terdapat empat tahapan dalam metodologi sejarah yaitu

pengumpulan data (Heuristik), verifikasi (kritik data), interpretasi (Penafsiran), dan Historiografi (Penulisan).¹⁷

1. Pengumpulan Data (Heuristik)

Dengan memasuki tahap pengumpulan sumber atau data (*heurestik*) seorang peneliti sejarah memasuki lapangan (medan) penelitian. Kerja penelitian secara actual dimulai. Dilapangan ini kemampuan teoritis yang bersifat deduktif-spekulatif sebagai tertuang dalam proposal atau rancangan penelitian akan diuji secara induktif empirik atau pragmatik.¹⁸ Langkah sejarawan untuk mengumpulkan sumber-sumber (*sources*) atau bukti-bukti (*evidences*) sejarah ini dibuat heuristik. Kata *heurestik* berasal dari “*heureskein*”, dalam bahasa Yunani yang berarti mencari atau menemukan. Dalam bahasa Latin, heuristik dinamakan sebagai *ars inveniendi* (seni mencari) atau sama artinya dengan istilah *arts of invention* dalam bahasa Inggris.

Mencari dan mengumpulkan sumber sebagian besar dilakukan melalui kegiatan bibliografis. Laboratorium penelitian bagi seorang sejarawan adalah perpustakaan dan alatnya yang paling bermanfaat adalah katalog. Disaat sekarang, kerja heuristik sudah diatur demikian sehingga tidak lagi menyusahkan sejarawan.¹⁹

Perlu diketahui, sejarawan atau peneliti bahwa tidak semua arsip yang dibutuhkan dapat digandakan jika penggandaan sumber arsip itu dianggap dapat membahayakan keselamatan seseorang maka hal itu tidak dapat dilakukan. Privatisasi dan keselamatan seseorang tetap diperhatikan oleh pihak pengelola arsip.

¹⁷ Abd Rahman Hamid, pengantar ilmu Sejarah, (Yogyakarta, penerbit ombak, 2015), hlm.15

¹⁸ A Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm: 51.

¹⁹ *Ibid*, hlm.52.

Sumber data terdiri dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber yang berasal dari proses pencarian dokumen atau melalui wawancara dengan pelaku sejarah. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber yang berasal dari studi Pustaka (*Library Research*).

a. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiono yakni suatu proses yang dilakukan dalam mendapatkan informasi dan data baik dalam bentuk arsip, buku, dokumen, tulisan angka, dan gambar dalam bentuk laporan serta keterangan yang mampu mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang terkumpul lalu diverifikasi kebenarannya. Dokumen yang digunakan dalam hal ini adalah dokumentasi keterangan dalam mewawancarai pelaku sejarah.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan pemuatan penelitian dalam suatu objek. Jika dilihat dari proses pengumpulan data yang dilakukan dalam melakukan pengumpulan data, observasi dapat digunakan dapat dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan yakni pengamatan yang hanya diminati beberapa kelompok atau individu (tidak langsung terlibat). Seperti yang dilakukan dalam penelitian ini penulis tidak langsung terlibat dalam aktivitas Bersama pelaku sejarah, hanya mampu melakukan dalam proses pengumpulan data dari proses wawancara.²⁰

c. Wawancara

²⁰ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hlm 26.

wawancara adalah pola yang dilakukan dalam pengumpulan informasi terkait dalam penelitian. Wawancara memiliki tujuan yang didahului oleh pertanyaan informal tentang suatu hal tentang penelitian yang ingin diajukan. Dengan menggunakan metode wawancara, penulis dapat menggunakan panduan wawancara dengan mengajukan serangkaian pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan data yang peneliti butuhkan. Wawancara pada penelitian kualitatif ini memiliki objeknya yakni tokoh-tokoh yang aktif sebagai penggerak dan berkontribusi dalam berdirinya PMII Cabang Cirebon serta para tokoh sebagai pelaku sejarah.²¹

2. Verifikasi (kritik data)

Kritik Sumber adalah salah satu Uji Validasi data Sejarah untuk membuktikan kebenaran dari data sejarah tersebut.²² Dalam usaha mencari kebenaran (*truth*), seorang sejarawan dihadapkan dengan kebutuhan untuk membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Masalahnya dalam kehidupan nyata sehari-hari, manusia selain telah banyak berbuat benar tidak pula jarang membuat kesalahan-kesalahan, bahkan ada pula yang tidak segan-segan melakukan pemalsuan atau kejahatan lainnya. Dalam surat-surat pembaca di surat kabar atau majalah misalnya seringkali ditemui pembaca yang kritis mencoba membantah atau meluruskannya.

Sehubungan dengan segala kemungkinan di atas, untuk dapat memutuskan ini semua sejarawan harus mengerahkan segala kemampuan pikirannya, bahkan seringkali ia harus menggabungkan antara pengetahuan, sikap ragu, percaya begitu saja, menggunakan

²¹ Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*, Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 11, No.1, Maret 2007, Hlm.36.

²² Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah*, (Jakarta: Mega Book Store, 1984), Hlm.32.

akal sehat dan melakukan tebakan intelijen. Inilah fungsi kritik sehingga karya sejarah merupakan produk dari suatu proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kritik data umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber pertama. Kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan dari sumber itu. Dalam metode sejarah dikenal dengan cara melakukan kritik eksternal dan kritik internal.²³ Kredibilitas sumber lisan sebagai fakta sejarah menurut Gilbert J Garraghan harus memenuhi dua syarat utama. *Pertama*, yakni sumber lisan harus didukung oleh saksi yang berantai dan disampaikan oleh pelapor pertama yang terdekat. *Kedua*, yakni bahwa sumber lisan mengandung kejadian penting yang diketahui umum, dengan kata lain menjadi kepercayaan umum pada masa tertentu.²⁴

3. Interpretasi

Proses perjalanan penelitian sejarah yang bermuara pada metode sejarah dengan empat tahap, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi, pada hakikatnya berpuncak pada tahap interpretasi. Heuristik dan kritik berfungsi untuk menyeleksi sumber-sumber atau data-data sejarah, sehingga didapatkan fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah yang valid dan *reliable*. Interpretasi berarti menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah. Interpretasi diperlukan karena pada dasarnya bukti-bukti sejarah sebagai saksi relitas di masa lampau adalah hanya saksi-saksi bisu belaka. Fakta-fakta atau bukti-bukti dan saksi-saksi sejarah itu tidak

²³ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), hlm.84.

²⁴ Abd Rahman Hamid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm.48.

bisa berbicara sendiri mengenai apa yang disaksikannya dari realitas masa lampau.

Untuk mengungkapkan makna dan signifikansi dirinya, fakta-fakta dan bukti-bukti sejarah masih harus menyadarkan dirinya pada kekuatan informasi dari luar ialah peneliti atau sejarawan. Secara metodologis interpretasi merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan proses penelitian sejarah dan penulisan sejarah.²⁵

4. Historiografi (Penulisan)

Historiografi menjadi sarana mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji dan diinterpretasi. Kalau penelitian sejarah bertugas merekonstruksi sejarah masa lampau, maka rekonstruksi itu hanya akan menjadi eksis apabila hasil-hasil pendirian tersebut ditulis.

Penulisan sejarah tidak semudah dalam penulisan ilmiah lainnya, tidak cukup menghadirkan informasi dan argumentasi. Penulisan sejarah, walaupun terikat pula oleh aturan-aturan logika dan bukti-bukti empiris, tidak boleh dilupakan bahwa ia adalah juga karya sastra yang menuntut kejelasan struktur dan gaya bahasa, aksentuasi serta nada retorika tertentu. Karya penulisan penelitian sejarah dapat mengambil beberapa bentuk seperti *paper*, *artikel* atau *buku*, bahkan *buku* yang berjilid-jilid. Masing-masing bentuk memiliki prinsip-prinsip yang berbeda, menuntut komposisi dan gaya bahasa serta jenis-jenis kerja yang berlainan pula. Dalam penulisan ini lebih difokuskan pada prinsip-prinsip umum penulisan sejarah ilmiah pada umumnya.²⁶

Menulis sejarah merupakan suatu kegiatan intelektual dan ini suatu cara yang utama untuk memahami sejarah. Ketika sejarawan

²⁵ A Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm.82.

²⁶ *Ibid*, hlm.99.

memasuki tahap menulis, ia mengerahkan seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi yang terutama penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena ia pada akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh yang disebut *historiografi*.²⁷

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yakni penjelasan mengenai susunan dari kelima Bab yang akan dijabarkan kedalam bab-bab berikut:

Bab Pertama merupakan bab Pendahuluan, dimana terdapat Landasan awal penelitian. Meliputi, Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, landasan teori, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua menjelaskan tentang sejarah berdirinya Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), disini penulis akan menyajikan latar belakang berdirinya PMII, perkembangan PMII pada masa orde baru serta makna di balik pembentukan nama PMII dan arti lambing PMII dan prose lahirnya Nilai Dasar Pergerakan (NDP).

Bab ketiga akan membahas lahirnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Cirebon serta dinamika yang terjadi pada saat berdirinya PMII cabang Cirebon dan tokoh-tokoh yang mendirikan PMII cabang Cirebon.

Bab keempat berisi tentang Perkembangan PMII cabang Cirebon pada saat Orde Baru, disini penulis akan menyajikan Gerakan sosial dan

²⁷ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), hlm.99.

keagamaan serta dinamika yang terjadi serta gerak jalanan dilakukan di Cirebon pada saat pemerintahan Orde Baru berkuasa hingga berakhir dan digulingkan.

Bab kelima merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan atau jawaban ringkas atas suatu permasalahan yang ditanyakan dalam penelitian. Kesimpulan adalah suatu hasil akhir yang disajikan oleh penulis kepada para pembaca dan para akademisi khususnya yang memiliki perhatian terhadap organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Cirebon.

